

KEBIJAKAN NAWA CITA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

Adityo Darmawan Sudagung, Hardi Alunaza SD

Universitas Tanjungpura Pontianak

adityo.ds@fisip.untan.ac.id, hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstract

This research's purpose was attempted to explain how Nawa Cita can be used in accelerating the development of the West Kalimantan border area. This border area was neglected by the government. *Some problems occurred, such as the worst condition of infrastructures, ineffective law enforcement and use of natural and human resources.* Researchers used Rational Choice as a foreign policy perspective with data obtained through literature studies in online journals, books, and articles. We found that the realization of Nawa Cita policy at the border area of West Kalimantan had been carried out with a shift in the direction of policy, the construction of Cross Border Post, supporting infrastructure, and border security. Indonesia also revitalizing the role and function of the National Border Management Agency (BNPP), increasing the protection of natural resources, and making a harmonious approach on welfare and security, especially to reduce poverty.

Keywords: border area, border policy, nawa cita.

Abstrak

Tulisan ini disajikan guna menjawab pertanyaan penelitian bagaimana Nawa Cita dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. Kawasan perbatasan tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah. Masalah yang ditemui di sana, antara lain adalah buruknya infrastruktur, penegakan hukum yang tidak maksimal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang tidak optimal. Penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional sebagai turunan dari perspektif dalam kebijakan luar negeri dengan pengumpulan data didapatkan melalui teknik

studi literatur yang berasal dari bab buku, artikel di dalam jurnal, dan artikel daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan kebijakan Nawa Cita di kawasan perbatasan di Kalimantan Barat telah dilakukan dengan pergeseran arah kebijakan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, infrastruktur penunjang, dan pengamanan perbatasan. Indonesia juga merevitalisasi peran dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam, dan melakukan penyelarasan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata kunci: kawasan perbatasan, kebijakan perbatasan, Nawa Cita.

Article History: Received 20 July 2020, Revised: 15 August 2020, Accepted: 29 November 2020, Available online 01 December 2020

Pendahuluan

Kawasan perbatasan masih menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan. Sebagian kawasan perbatasan masih berstatus daerah tertinggal. Kendala akses yang membuat aktivitas masyarakat dan pembangunan menjadi terhambat. Selain itu, secara kualitas sumber daya manusia beberapa daerah perbatasan juga masih perlu diperhatikan dengan sangat masif dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masalah-masalah aktivitas pembalakan hutan, penjualan manusia, dan narkoba ilegal juga masih sering ditemukan di kawasan perbatasan (Gabriella, 2019: 149). Untuk kawasan perbatasan Kalimantan Barat sendiri hampir setiap tahunnya selalu terjadi kasus penyelundupan narkoba ilegal dari Malaysia. Meskipun masih diperdebatkan apakah terdapat kesengajaan dari pihak keamanan Malaysia untuk meloluskannya ke Indonesia.

Sebelum 2010, pembangunan kawasan perbatasan masih mengedepankan aspek keamanan saja. Pendekatan yang diambil ini kemudian menyebabkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi terabaikan. Masyarakat di perbatasan sering sekali menyampaikan keluhan pada pejabat baik

nasional maupun daerah yang hadir. Tetapi, aksi nyatanya masih belum banyak terasa. Bahkan masyarakat di beberapa daerah sempat mengancam akan berpindah kewarganegaraan jika tidak juga diperhatikan. Pemerintah, dengan kesadaran akan tuntutan masyarakat, menginisiasi pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Badan ini bertugas melakukan koordinasi antar instansi terkait baik di tingkat nasional maupun di daerah. Serta bertujuan melaksanakan program-program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan.

Di Pulau Kalimantan, khususnya di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak terdapat sekitar 966 km garis perbatasan antara kedua negara. Kawasan perbatasan meliputi Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu (Marihandoko, 2010). Kelima kabupaten tersebut terbagi atas empat belas kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Menurut data dari Kementerian Pertahanan di tahun 2007, untuk menangani masalah perbatasan belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu (Kemhan, 2007). Faktor lainnya adalah konflik antar lembaga atau instansi yang mengurus kawasan perbatasan. Masing-masing merasa berhak atau sebaliknya masing-masing saling melempar tanggung jawab dalam membangun kawasan perbatasan. Meskipun sudah terdapat kebijakan otonomi daerah, masalah lempar tanggung jawab antara pusat dan daerah masih terjadi. Selama beberapa tahun terakhir peneliti mengadakan penelitian dengan tema perbatasan, maka masalah koordinasi antara pusat dan daerah selalu menjadi masalah yang muncul dan dikemukakan oleh masing-masing pihak.

Seperti contoh di Kabupaten Sanggau dan Sambas, kebijakan pembangunan perbatasan selama ini hanya menempatkan mereka sebagai sabuk keamanan (Mulyawan, 2012). Alhasil, dua kabupaten tersebut masuk dalam klasifikasi kawasan daerah tertinggal. Meskipun seperti yang peneliti

paparkan, bahwa otonomi daerah sudah berlangsung tetapi pemerintah pusat tidak bisa serta merta melepaskan begitu saja tanggung jawab membangun kawasan terdepan Indonesia.

Masalah infrastruktur dan akses ke kawasan-kawasan perbatasan sering dianggap menjadi penyebab susahny daerah tersebut berkembang. Tidak hanya di bidang ekonomi terkait perdagangan barang dan jasa. Tapi, pelayanan pendidikan dan kesehatan juga terhambat. Di Kalbar sendiri dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terdapat masalah para guru atau dokter di kawasan perbatasan yang memilih untuk kembali ke daerah asal. Kondisi sekolah dan fasilitas kesehatan yang belum memadai ikut menghambat pelayanan yang diberikan oleh para guru dan tenaga kesehatan tersebut.

Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) tetap menjadi ujung pangkal masalah dari semua keterbelakangan yang dirasakan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dampak paling nyata di Kalimantan Barat secara keseluruhan IPM berada di posisi lima besar terbawah dari seluruh Indonesia. Tidak menjadi hal yang aneh jika berkaca pada masalah-masalah yang telah peneliti paparkan di atas. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan Aruk juga menjadi pos perlintasan warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran ke Malaysia yang kebanyakan sebagai pekerja informal baik sebagai pekerja rumah tangga atau pekerja di kebun sawit.

Kesenjangan tingkat kesejahteraan, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kondisi infrastruktur yang minim memicu timbulnya ketergantungan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Ketergantungan masyarakat perbatasan yang tinggi terhadap negara tetangga, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, bahkan kesehatan (berobat ke negara tetangga) (BNPP RI, 2011: 19).

Kondisi ini dapat dilihat pada contoh di Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Menurut data

pada tahun 2011, hampir seluruh penduduk Aruk melakukan aktivitas belanja kebutuhan ke daerah Biawak, Sarawak (Nurul, 2011). Untuk kebutuhan perdagangan, masyarakat lebih sering menjual hasil pertanian dan kebun ke Malaysia. Faktor kedekatan akses menuju pasar menjadi hal yang mendasari aktivitas ekonomi tersebut. Tambahan data lain dari dokumen BNPP (2011: 20) menyebutkan bahwa hampir seluruh penduduk di desa-desa perbatasan memanfaatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, dan air bersih dari Malaysia secara cuma-cuma atau tidak berbayar.

Sejak melakukan kampanye sebelum tahun 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menekankan bahwa kawasan perbatasan akan menjadi prioritas. Janji kampanye bernama Nawa Cita juga kemudian menempatkan kawasan perbatasan sebagai salah satu poin yang penting. Redaksi poin ketiga dari Nawa Cita menyebutkan bahwa kedua pasangan akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Nawa Cita digunakan oleh Jokowi untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Analisis kebijakan Jokowi-JK dilakukan melalui sudut pandang Hubungan Internasional dengan teori rasional aktor model. Mengingat bahwa fenomena hubungan internasional yang bersinggungan langsung dengan kajian perbatasan antar negara memerlukan perhatian dan penanganan yang diimplementasikan dalam sebuah kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK sejak tahun 2014.

Selama ini belum ada tulisan yang membahas dan menganalisis langsung bagaimana kebijakan Nawa Cita Jokowi di perbatasan Kalimantan Barat. Beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya adalah mengenai kebijakan Nawa Cita dari sudut pandang ekonomi yang ditulis oleh Syam Surya Syamsi (2015) yang menjelaskan Nawa Cita sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan tapi lebih mendeskripsikan dari budaya kerja birokrasi. Berikutnya juga telah ada tulisan Asep

Ahmad (2015) terkait mewujudkan agenda prioritas Nawa Cita yang berisi penjelasan mengenai benih tanaman dan produk pangan lokal di Indonesia secara umum. Penelitian lainnya mengenai fenomena di perbatasan Kalimantan Barat dan upaya pemerintah menyikapinya juga pernah dilakukan oleh Effendi (2009), Syafei (2012), Abd Hair Awang, dkk (2013), Eilenberg dan Wadley (2009), Said (2011), dan Safitri (2013).

Penelitian Effendi (2009) dan Syafei (2012) menekankan pada permasalahan pembangunan di perbatasan Kalimantan Barat yang belum terselesaikan dengan baik. Effendi (2009) lebih menekankan pada kewenangan pemerintah daerah di era otonomi yang dirasa belum maksimal. Syafei (2012) memfokuskan pembahasannya pada aspek hukum pengaturan pengelolaan perbatasan pasca pembentukan BNPP. Penelitian oleh Abd Hair Awang, dkk (2013) dan Eilenberg dan Wadley (2012) lebih menekankan pada fenomena hubungan lintas batas masyarakat di perbatasan kedua negara. Sementara tulisan Said (2011) dan Safitri (2013) menekankan pada kondisi nasionalisme yang terdampak faktor ekonomi. Said (2011) lebih spesifik menjelaskan upaya internalisasi ideologi di perbatasan, sedangkan Safitri (2013) lebih banyak memfokuskan tulisan pada nasionalisme masyarakat yang melemah disebabkan keterbatasan ekonomi.

Adapun studi terdahulu yang menggunakan teori pilihan rasional dalam Hubungan Internasional pernah dilakukan oleh Herman (2015). Herman (2015) menganalisa penggunaan teori tersebut untuk menjelaskan motivasi Tiongkok berpartisipasi dalam *peacekeeping operations*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teori yang sama dapat digunakan dalam kasus lain dalam studi Hubungan Internasional.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam upaya untuk menjelaskan kebijakan nawa cita Pemerintahan Jokowi-JK sebagai dasar yang digunakan untuk pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Proses pengumpulan data yang ada dalam tulisan ini adalah

melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal, laporan penelitian, artikel koran, dokumen resmi pemerintah, juga artikel *daring* dari sumber yang tepercaya. Guna memastikan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini, penulis melakukan *triangulasi* terhadap beberapa sumber data yang telah terkumpul agar dapat memastikan keilmiahan data akhir yang disajikan.

Teori Pilihan Rasional dalam Hubungan Internasional

Teori pilihan rasional berasumsi bahwa negara dapat dijadikan sebagai aktor yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan pencapaian berdasarkan kalkulasi rasional dalam kancan internasional. Lovel menjelaskan bahwa ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan suatu negara bangsa, yakni struktur dalam sistem internasional, persepsi elit, strategi negara bangsa yang lain, serta kemampuan yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut (Lovel dalam Yanyan, 2008: 1-2).

Lebih lanjut, dalam hal ini individu dipandang sebagai tokoh sentral yang memiliki pengaruh besar dalam proses pembuatan keputusan (Alunaza, dkk. 2018: 63). Pertimbangan terkait pengelolaan serta pembangunan ekonomi dan sektor keamanan di wilayah perbatasan adalah kedudukan Kalimantan Barat yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan berbatasan langsung dengan negara lain menjadikan kawasan ini menghasilkan nilai strategis.

Dalam tulisan ini daerah perbatasan dijelaskan sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi agar dapat dikembangkan dengan maksimal dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat perbatasan, serta sebagai modal yang dapat yang berpeluang digunakan dalam pembangunan daerah. Hal lain yang menjadikan daerah perbatasan sebagai peluang bagi percepatan proses pembangunan daerah adalah karena secara letak geografis yang memiliki kemungkinan dan peluang langsung untuk berhubungan dengan negara Malaysia. Tentu saja letak ini

menjadi pijakan untuk pasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi Indonesia baik secara daerah maupun untuk skala nasional.

Dalam artian sempit, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan akan terfokus kepada hubungan individu dan keluarga, sedangkan dalam arti yang lebih luas dalam hal ini dijelaskan sebagai keputusan yang diterapkan pada tingkat global, maka pengambilan keputusan adalah menyangkut hubungan Indonesia dengan negara lain. Teori pilihan rasional sebagai alat analisis yang dapat digunakan dalam menjelaskan bagaimana proses keputusan itu diambil, untuk mendapatkan tujuan yang merupakan kepentingan agar didapatkan secara maksimal. Pada konteks negara, teori ini dijelaskan sebagai perangkat yang dibuat untuk mendapatkan tujuan dan *national interest* negara yang dapat berupa kepentingan politis atau pun bukan. Jika dilihat dengan teori ini, maka sumber daya alam yang ada di daerah perbatasan serta letak geografisnya yang strategis merupakan hal yang krusial yang dapat menjadi cerminan kepentingan Indonesia. Lebih lanjut, keterkaitan antara sumber daya dan letak geografis dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin adalah sebagai penjelasan fungsional yang lebih luas antara Indonesia dan negara yang berbatasan langsung dengan daerah perbatasan. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam hal ini sangat penting untuk dapat menjamin adanya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Seperti yang disebutkan dalam penjelasan James S. Coleman (Mudiarta, 2011: 58-59) bahwa bagian terpenting yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan pada pilihan rasional adalah aktor penentu arah kebijakan dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penentu arah kebijakan tersebut adalah Presiden Joko Widodo dengan melihat dan memanfaatkan sumber daya yang potensial di daerah perbatasan (Mudiarta, 2011: 58-59). Berdasarkan penjelasan di atas dapat

dideskripsikan lebih jauh bahwa yang menjadi kunci atas sumber daya yang tersedia adalah berdasarkan pada aktor pembuat kebijakan yang tentu didasarkan pada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan. Dalam hal inilah kemudian dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai aktor yang mewakili Indonesia membuat kebijakan demi tujuan dan agenda pembangunan nasional Indonesia.

Selain Joko Widodo yang dijelaskan sebagai aktor dalam penentu arah kebijakan yang diambil, teori pilihan rasional ini juga menuturkan bahwa keputusan yang diambil oleh penentu kebijakan merupakan hal yang dapat menjelaskan perilaku suatu negara secara kolektif. Hal itu didasarkan pada adanya proses pengendalian dari individu menuju pihak lain yang lebih plural (Arjawa, 2014). Pada fenomena ini, teori pilihan rasional dapat juga digunakan untuk menjelaskan perilaku kelompok. Hal itu didukung oleh pernyataan bahwa individu memegang peranan penting dalam teori pilihan rasional dengan tidak melupakan peran dan fungsi aktor lain, yakni kelompok. Penjelasan ini diasumsikan bahwa kelompok tersebut tetap digerakkan oleh adanya peran dari individu yang memiliki peran dominan dalam suatu negara.

Pada tulisan ini pilihan rasional adalah Nawa Cita Jokowi mengenai implementasi kebijakan pemerataan pembangunan antar wilayah di kawasan perbatasan. Pertimbangan kebijakan tersebut adalah daerah perbatasan yang kaya akan sumber daya alam dan berbatasan dengan negara lain sebagai halaman depan negara dan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan. Hal itu didasari oleh pertimbangan arah kebijakan nasional pembangunan perbatasan yang *outward looking*. Dilanjutkan dengan pertimbangan Undang-Undang 26 tahun 2007 mengenai penataan ruang wilayah nasional yang meliputi ruang darat, laut, dan udara yang kemudian bersambung menjadi pada Undang-Undang 43 tahun 2008 terkait kebijakan yang harus ditetapkan guna mengatur

pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk Kalimantan Barat.

Hingga pada tahun 2014, Jokowi menetapkan kebijakan mengenai kewenangan penuh Pemerintah Pusat dalam mengelola kawasan perbatasan dengan melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang termasuk dalam pusat prioritas pembangunan pos lintas batas adalah Aruk di Sambas, Entikong di Sanggau, dan Badau di Kapuas Hulu (Suprayoga, 2017).

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan nawa cita yang dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pembangunan ekonomi, keamanan, dan pengelolaan sumber daya di kawasan perbatasan Kalimantan Barat.

Kebijakan Perbatasan Indonesia Era Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat

Sejak era Joko Widodo (Jokowi) pemerintahan Indonesia sudah menempatkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Jelas sekali terwujud dalam konsep Nawa Cita yang menjadi bagian dari janji kampanye politik beliau. Walaupun perlu diperhatikan bahwa pergeseran arah kebijakan perbatasan sudah dirintis pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kedua presiden Indonesia tersebut merubah paradigma pembangunan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* serta menambahkan pendekatan kesejahteraan sebagai pendamping pendekatan keamanan dan tidak lagi bersifat *inward looking*. Berdasarkan penelitian Sudagung (2015: 83) menyebutkan bahwa SBY mengawali dengan mencantumkan orientasi kebijakan pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Nawa Cita sebagai bagian dari kampanye politik merupakan salah satu jargon, yang di kemudian hari ditetapkan menjadi arah kebijakan rezim Jokowi-JK, yang mengakomodir kawasan perbatasan negara. Bunyi poinnya adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” (Kompas.com).

Di samping menjadikan kawasan perbatasan sebagai daerah prioritas selama masa pemerintahannya, Presiden Jokowi juga berkali-kali menyatakan bahwa perbatasan adalah martabat bangsa dan sudah seharusnya masyarakat perbatasan merasa bangga dan tidak minder berada di garis depan negara (Rahman, 2014). Presiden juga menegaskan bahwa perbatasan merupakan etalase (wajah depan) Indonesia yang secara prinsip harus tampak lebih baik dari Malaysia (liputan6.com). Wajah negara Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar ingin lebih ditonjolkan. Hal ini dilakukan dengan memoles wajah depan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur (Jordan, 2016).

Pemerintah Indonesia, di era Joko Widodo-Jusuf Kalla, melakukan setidaknya beberapa upaya untuk membangun kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Pertama, presiden melakukan beberapa kali kunjungan ke kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Kedua, presiden menerbitkan inpres (instruksi presiden) yang menekankan pada percepatan pembangunan PLBN terpadu dan fasilitas penunjang kawasan perbatasan. Ketiga, pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Keseriusan Jokowi ditunjukkan dengan intensitas kunjungan beliau ke kawasan-kawasan perbatasan Indonesia. Secara khusus beliau datang untuk memeriksa dan memastikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di sana. Bahkan selama rentang waktu 2016-2017 Presiden Jokowi telah mengunjungi kawasan perbatasan Kalimantan Barat sebanyak lebih dari tiga kali. Penulis juga menjadi saksi

selama beberapa tahun terakhir Kalimantan Barat beberapa kali menerima kedatangan Presiden, yang salah satu agendanya adalah memantau kawasan perbatasan.

Kehadiran presiden beberapa kali ke wilayah perbatasan menunjukkan sinyal yang sangat positif terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Beliau selalu menegaskan perhatian dan prioritas pemerintah terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Aksi-aksi tersebut menunjukkan harapan yang menggembirakan bagi masyarakat di perbatasan. Bahwa jelas keseriusan tersebut dilaksanakan, tidak hanya semboyan kampanye semata.

Upaya kedua yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah menandatangani inpres mengenai percepatan pembangunan pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjang. Instruksi tersebut di tanda tangani pada tanggal 28 April 2015. Presiden secara khusus menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat terkait agar dapat melakukan upaya pembangunan perbatasan berdasarkan kewenangan instansi masing-masing. Presiden juga menekankan pada upaya koordinasi dan integrasi yang ditujukan melakukan akselerasi pembangunan 7 PLBN terpadu di kawasan perbatasan (Setkab, 2015).

Presiden menekankan pada percepatan upaya penanganan kawasan perbatasan yang ditentukan selesai dalam waktu dua tahun sejak inpres ditandatangani. Mengenai pembiayaan program, dalam inpres disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN dan dibantu dengan APBD, dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Penulis melakukan penelusuran data mengenai implementasi dari inpres tersebut. Ketujuh PLBN yang di target sejak tahun 2015 telah selesai dan diresmikan (Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2018). Berturut-turut peresmian PLBN tersebut adalah PLBN Badau (Kalimantan Barat) 16 Maret 2016, PLBN Aruk (Kalimantan Barat) 17 Maret 2016, PLBN Entikong (Kalimantan Barat) 21 Desember 2016, PLBN

Motaain (Nusa Tenggara Timur) 28 Desember 2016, PLBN Skouw (Papua) 9 Mei 2017, PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur) dan PLBN Motamasin (Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 9 Januari 2018.

Adanya pencapaian tersebut patut diapresiasi. Bahwa program yang direncanakan melalui inpres percepatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sudah terdapat perbaikan dalam koordinasi dan kerja sama antar kementerian dan lembaga. Padahal masalah tersebut yang selama ini selalu menjadi kendala dalam pembangunan kawasan perbatasan. Momentum peningkatan ini dapat dipertahankan dalam membangun Indonesia, khususnya perbatasan, menjadi lebih baik.

Kemudian, pembangunan PLBN juga diimbangi dengan pembangunan sarana infrastruktur lainnya. Pembangunan jalan menuju pos lintas batas, jalan paralel antar kabupaten perbatasan, pemukiman beserta sarana air dan listrik, dan posko militer di daerah perbatasan. Kementerian PUPR di tahun 2015 telah menyelesaikan dua kegiatan, antara lain peningkatan struktur dan pelebaran jalan di tiga kawasan perbatasan, yaitu di Aruk, Entikong serta Nanga Badau (Aditiasari, 2016). Secara total jalan yang diselesaikan mencapai sekitar 600-700 meter dari ketiga PLBN tersebut serta telah dilebarkan menyerupai jalan tol dengan empat lajur lengkap dan bahu jalan. Hal ini sesuai dengan permintaan langsung dari presiden yang menginginkan jalan di perbatasan Indonesia lebih bagus dari jalan di Malaysia. Kondisi ini sudah diamati dengan melakukan perjalanan ke arah Entikong dan Aruk yang jalannya sudah mulus.

Selain memperlebar jalan menuju pos lintas batas, pemerintah juga melakukan konstruksi jalan paralel yang dibangun sepanjang garis batas negara. Diharapkan jalan paralel ini mampu menghubungkan daerah-daerah terdepan di Indonesia. Pembangunan tersebut ditujukan juga untuk membuka daerah-daerah terdepan negara Indonesia yang masih terisolir. Adapun panjang jalan paralel tersebut kurang

lebih 1.700 Km dan di Kalbar sendiri ruas jalan paralel sejumlah 732 km. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2018 semua daerah di sepanjang garis perbatasan sudah bisa tersambung (Antonius, 2018). Melalui proyek perbaikan akses jalan serta pembukaan akses baru akan sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan aktivitas jual beli. Biaya perjalanan yang dikeluarkan akan lebih murah dengan waktu tempuh yang lebih baik. Arus barang ke sesama daerah perbatasan Indonesia akan lebih mudah.

Walaupun demikian, pola pengelolaan sumber daya yang ada di daerah perbatasan masih harus tetap diperhatikan. Meskipun waktu tempuh sudah semakin pendek, tapi jarak antara ibukota Sarawak, yaitu Kuching masih tetap lebih dekat dibandingkan jarak daerah-daerah perbatasan ke Pontianak. Penulis pernah melakukan diskusi dengan salah seorang staf pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa meskipun akses jalan sudah membaik, roda ekonomi tetap saja berputar di daerah perbatasan Malaysia. Suplai barang juga lebih banyak dari Malaysia, serta masyarakat Indonesia menjual bahan produksinya ke sana. Contohnya di daerah Serikin, Sarawak. Pasar yang sudah lama digunakan sebagai tempat perdagangan lintas batas tetap ramai walau hanya dibuka di akhir pekan.

Hal yang juga penting adalah pemerintah membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di antara kawasan perbatasan yang dapat menuju ibu kota kabupaten atau kecamatan. Sehingga masyarakat juga memiliki alternatif beraktivitas ekonomi di daerah negara sendiri. Selain membangun infrastruktur menuju pos lintas batas, pemerintah Indonesia era Jokowi-JK juga melakukan percepatan pembangunan di sembilan kawasan perbatasan melalui program Kementerian PUPR. Program percepatan pembangunan ditangani oleh Kementerian PUPR yang berkoordinasi dengan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi (liputan6.com). Program percepatan tersebut mencakup penyediaan air bersih serta sanitasi dan infrastruktur pemukiman warga. Contohnya rencana pembangunan permukiman Aruk Sajikan Besar

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang akan menghabiskan dana sebesar enam puluh tiga miliar rupiah (Idris, 2016).

Dampak dari program ini belum dapat ditemukan karena data yang masih kurang memadai. Namun, hal tersebut patut diapresiasi karena sudah ada rencana aksi nyata yang akan dieksekusi oleh pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Berkaca dari upaya pembangunan PLBN yang dapat memenuhi target, peneliti optimis program Kementrian PUPR ini juga dapat berhasil dengan baik.

Rencana pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membangun beberapa pangkalan militer. Hal ini disampaikan oleh ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan sekaligus Menteri Dalam Negeri. Tujuan pembuatan pangkalan militer di perbatasan adalah untuk menjaga stabilitas keamanan di perbatasan (Ramadhan, 2016). Alasan pendirian pangkalan disebabkan kesan terhadap daerah perbatasan yang rentan akan pelanggaran imigrasi dan juga penyelundupan narkoba lintas batas. Salah satu pangkalan militer yang akan dibangun adalah di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Entikong.

Upaya menghadirkan tentara secara lebih masif dapat memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam aspek keamanan militer. Permasalahan kekurangan personil pengamanan perbatasan masih sering sekali menjadi salah satu pembenaran lemahnya keamanan Indonesia di perbatasan. Banyaknya aktivitas ilegal dianggap hal yang wajar terjadi karena tidak proporsionalnya jumlah personil dan sarana penunjang pengamanan dibandingkan dengan panjangnya kawasan perbatasan yang harus dijaga. Tidak menutup kemungkinan pos pengamanan di Entikong adalah awal dari hadirnya pangkalan-pangkalan militer lain di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Jika ditinjau dari sudut pandang keamanan nasional, kehadiran pangkalan merupakan suatu keharusan karena akan mampu meningkatkan upaya pengamanan di kawasan perbatasan.

Karena negara dalam sistem dunia yang anarkis harus memastikan bahwa tidak ada negara lain yang berada di atasnya. Di samping itu, kedaulatan bagi suatu negara adalah harga mati.

Pendekatan keamanan dapat saja menjadi penyeimbang dari pendekatan kesejahteraan. Negara harus terlebih dahulu mampu mewujudkan diri sebagai aktor yang serius menjaga perbatasannya. Sebelum Indonesia benar-benar membuka diri mengikuti arus zaman yang *borderless*. Tetapi, perlu dicatat bahwa tidak hanya sekadar memindahkan personil tanpa melakukan kegiatan-kegiatan berbasis kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM. Sekalipun personil tentara berjumlah ribuan tapi akan jadi sia-sia jika masih memiliki masalah kondisi ekonomi yang susah, akses terbatas, serta dikelilingi dengan budaya koruptif yang masih dipelihara oknum aparat tentara, polisi, atau sipil.

Penegakan hukum di semua tingkat dari lokal hingga nasional harus dilaksanakan dengan baik. Pemerintah dan masyarakat harus mulai membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa (seperti korupsi, pungli, semangat membantu melancarkan urusan orang-orang yang secara personal dikenal baik). Beberapa langkah yang telah dipaparkan menunjukkan terjadi peningkatan perhatian dan aksi nyata dalam membangun kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. Hal yang perlu untuk menjadi perhatian adalah proses pengawasan proyek. Aspek koordinasi lintas sektor di antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan untuk menghindari kesalahan komunikasi. Selain itu, diharapkan juga penyakit lama saling lempar tanggung jawab antar instansi terkait dapat dihilangkan. Masyarakat juga perlu disiapkan.

Mereka dipersiapkan secara sosial karena ke depan, kawasan perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat dapat saja menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru jika kondisi infrastrukturnya sudah tuntas dibangun. Jangan sampai masyarakat perbatasan hanya jadi penonton saja saat daerah

mereka sudah siap karena yang menikmati adalah investor dari luar daerah mereka.

Pengambilan kebijakan Nawa Cita dapat dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan teori pilihan rasional. Pada tataran konseptual sudah dipaparkan bahwa terdapat dua indikator yang menentukan pengambilan kebijakan, yaitu aktor dan sumber daya. Kebijakan Nawa Cita dapat juga dilihat pada kedua aspek tersebut.

Pertama, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan sangat beragam. Mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai inisiator kebijakan, kabinet pemerintahan, pemerintah daerah dan aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Meski demikian peneliti berpendapat bahwa aktor yang sangat dominan dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dominasi aktor ditandai dengan berbagai pernyataan serta aksi yang ditunjukkan oleh keduanya berkaitan dengan kondisi perbatasan. Keberadaan menteri kabinet serta aparat keamanan pada dasarnya mengikuti arahan dari pemimpin tertinggi di negara tersebut. Pengusaha atau investor dapat dijadikan alasan pendorong presiden dan wakil presiden meningkatkan pembangunan perbatasan.

Masalah klasik yang selama ini terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia bermuara pada masalah-masalah ekonomi. Sehingga memberikan peluang bagi pengusaha dengan menyediakan infrastruktur yang baik menuju dan juga di perbatasan menjadi penting. Terbukanya akses bagi pelaku-pelaku ekonomi akan ikut memajukan perekonomian warga sekitar. Meskipun proses ini masih perlu diuji lebih lanjut dengan meneliti seberapa besar dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga perbatasan akibat kebijakan infrastruktur tersebut.

Analisis lainnya terkait sumber daya ekonomi yang ada di perbatasan menjadi salah satu faktor penentu dihasilkannya kebijakan Nawa Cita. Kondisi sebelumnya yang menunjukkan warga perbatasan yang terpaksa memenuhi kebutuhan ekonomi dengan berbelanja ke Malaysia serta aktivitas sosial

lainnya. Manusia-manusia Indonesia di perbatasan tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih nyata. Hasil pertanian dan perkebunan yang ada juga seharusnya dapat diolah dan menjadi keuntungan bagi negara. Bukan justru dijual mentah ke negara tetangga. Potensi ini yang kemudian dilihat, selain potensi harga diri bangsa dan keinginan Jokowi-JK menyentuh pinggiran negeri, sebagai dorongan diciptakannya kebijakan Nawa Cita.

Permasalahan potensi sumber daya ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh kepala negara di era-era sebelumnya. Hanya saja belum ada yang benar-benar melakukan aksi nyata membangun di perbatasan. Bahkan untuk level kepala daerah sekalipun. Masalah yang sering kali diangkat ke permukaan adalah soal kewenangan yang tumpang tindih. Sebelumnya juga sudah peneliti singgung bahwa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga momentum pembangunan perbatasan adalah koordinasi dan komunikasi. Banyaknya aktor yang terlibat (secara aktif atau terdampak kebijakan) membuat urusan pembangunan perbatasan harus dengan sangat cermat dipersiapkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral yang berujung pada masyarakat di perbatasan menjadi korban pembangunan parsial.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan kebijakan Nawa Cita melalui pengelolaan potensi di kawasan perbatasan di Kalimantan Barat telah dilakukan melalui berbagai upaya. Pertama, penegasan perbatasan berada dalam visi pembangunan. Kemudian presiden melakukan kunjungan secara fisik berkali-kali. Selain itu, presiden menandatangani inpres tentang percepatan pembangunan pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjang. Implementasi inpres tersebut melalui pembangunan PLBN, jalan menuju pos lintas batas, jalan paralel antar kabupaten perbatasan, pemukiman beserta sarana air dan listrik, dan posko militer di daerah perbatasan.

Penulis kemudian menyarankan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat. Pertama, melakukan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan baik secara fisik maupun kualitas manusianya. Kedua, pemerintah harusnya melakukan revitalisasi peran dan fungsi BNPP khususnya terkait kewenangan masing-masing instansi vertikal maupun horizontal yang menangani isu perbatasan. Ketiga, mendelegasikan personel BNPP ke daerah-daerah yang memiliki kawasan perbatasan. Diharapkan personel yang dikirim adalah yang lebih paham masalah-masalah pembangunan kawasan perbatasan. Kemudian upaya lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan perlindungan dan mengembangkan sumber daya alam yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pemerintah juga dapat menyelaraskan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perbatasan.

Daftar Rujukan

- Alunaza, Hardi, Sudagung, Adityo, Maulana, Ireng. (2018). "The Pacific Solution as Australia's Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrival (IMAS) in the John Howard Era". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14 (1).
- Arjawa, Suka. (2014). *Pilihan Rasional dibalik Pembebasan Corby*. *Jurnal Global Strategis*, 1 (8).
- Awang, Abd Hair, dkk. (2013). Informal Cross-Border Trade Sarawak (Malaysia) – Kalimantan (Indonesia): A Catalyst for Border Community's Development. *Asian Social Science*, 9 (4): 167-173.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2017). *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2017*. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2011). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara*

- dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014*. Jakarta: BNPP RI.
- Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2018). *Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN)*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Direktorat Wilayah Pertahanan. (2007). *Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim dalam Menjaga Kedaulatan NKRI*. Jakarta.
- Effendi, Chairil. (2009). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat)*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Eilenberg, Michael, Wadley, Reed L. (2009). Borderland livelihood strategies: The socio-economic significance of ethnicity in cross-border labour migration, West Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 50 (1): 58-73.
- Gabriella, Sara. (2019). Kerja Sama Interpol dalam Menangani Isu Penyeludupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Intermestic*, 3 (2): 147-172.
- Herman, F. (2015). A Theoretical Assesment of China's Rational Choice Decision Making in African Peacekeeping Operations. *International Journal of Multidisciplinary Academic Research*, 3 (2): 11-20.
- Hadi, Suprayoga. (2017). *Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Melalui Pengembangan Investasi Kawasan Perbatasan Pada Daerah Tertinggal Kerangka RPJM 2015-2019*
- Kemitraan Partnership. (2011). *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan.or.id
- Marihandoko, Djoko. (2010). Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat: Sumber, Sejarah, dan Permasalahannya. *Jurnal Kajian Budaya*.

- Mudiarta, Ketut. (2011). Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 29 (1).
- Mulyawan, Rahman. (2012). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dalam Konteks Otonomi Daerah*.
- Rani, Faisyal. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Pembangunan Sosial, *Jurnal Transnasional*, 4 (1).
- Saefullah, Asep Ahmad. (2015). *Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Safitri, Ririh Megah. (2013). *Disfungsi Negara di Wilayah Perbatasan : Studi Tentang Melemahnya Nasionalisme di Badau, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Said, M. Mas'ud. (2011). *Kajian Model Internalisasi Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan: Studi di Daerah Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Perairan Australia. Executive Summary*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sudagung, Adityo Darmawan. (2015). *Upaya Indonesia dalam Menghadapi Masalah Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak* (Tesis). Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Syafei, Muhammad. (2012). *Pengaturan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia Timur*. (Disertasi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Syamsi, Syam Surya. (2015). Nawa Cita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi. *Interdisciplinary Journal of Science & Technology*, 1 (1): 72-100.
- Daring/website online:**
- Aditiasari, Dana. *Begini Perkembangan Proyek Jalan Perbatasan RI-Malaysia*. Diambil dari

- <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3162900/begini-perkembangan-proyek-jalan-perbatasan-ri-malaysia-pada-tanggal-22-Oktober-2018>.
- Antonius, Immanuel. (2018). *Jalan Perbatasan RI-Malaysia Selesai Diaspal 2018*. Diambil dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2412583/jalan-perbatasan-ri-malaysia-selesai-diaspal-2018> pada tanggal 22 Oktober 2018.
- Hayat, Nurul. (2011). Menunggu Mulusnya Jalan Perbatasan Indonesia – Malaysia. Diambil 30 September 2019 dari <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=4377>.
- Idris, Muhammad. *Jokowi Kebut Pembangunan Infrastruktur 9 Permukiman di Wilayah Perbatasan*. Diambil dari <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3210088/jokowi-kebut-pembangunan-infrastruktur-9-permukiman-di-wilayah-perbatasan-pada-tanggal-7-Oktober-2018>.
- Jordan, Ray. *Jokowi: Pos Perbatasan di Entikong Akan Lebih Bagus dari Malaysia*. Diambil dari <http://news.detik.com/berita/3171335/jokowi-pos-perbatasan-di-entikong-akan-lebih-bagus-dari-malaysia-pada-tanggal-22-Oktober-2018>.
- Kompas.com. (2014). "*Nawa Cita*", *9 Agenda Prioritas Jokowi-JK*". Diambil dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> pada tanggal 22 Oktober 2018.
- Liputan6.com. *Cara Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan*. Diambil dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2510831/cara-kementerian-pupr-percepat-pembangunan-kawasan-perbatasan-pada-tanggal-22-Oktober-2018>.
- Liputan6.com. *Jokowi Rombak Total Daerah Perbatasan RI-Malaysia Tahun Ini*. Diambil dari <http://news.liputan6.com/read/2164084/jokowi-rombak->

total-daerah-perbatasan-ri-malaysia-tahun-ini pada tanggal 22 Oktober 2018.

Rahman, Muhammad Razi. (2014). *Efisiensi Ala Jokowi Rambah Penanganan Perbatasan*. Diambil dari <http://babel.antaranews.com/berita/16362/efisiensi-ala-jokowi-rambah-penanganan-perbatasan> pada tanggal 22 Oktober 2018.

Ramadhan, Lucky Ikhtiar. (2016). *Pangkalan Militer di Perbatasan, Tjahjo: Ini Visi Jokowi*. Diambil dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/19/078772508/pangkalan-militer-di-perbatasan-tjahjo-ini-visi-jokowi> pada tanggal 22 Oktober 2018.

Setkab. (2015). *Teken Inpres, Presiden Jokowi Instruksikan Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara*. Diambil dari <http://setkab.go.id/tekan-inpres-presiden-jokowi-instruksikan-percepatan-pembangunan-7-pos-lintas-batas-negara/> pada tanggal 22 Oktober 2018.